

TATA KELOLA KELEMBAGAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN SUMBAWA (Studi Kasus: Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Empang)

Kevin Saputra^{1*}, Irawansyah²

¹²Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Penulis Korespondensi: kvinsptr@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 31 Juni 2026 Accepted: 15 Agustus 2026 Published: 31 Agustus 2026	<i>The Free Nutritious Meal Program (Makan Bergizi Gratis/MBG) is one of the government's strategic policies aimed at improving community nutrition, particularly among students, while supporting the development of quality human resources. The success of this program depends heavily on institutional governance involving local government, relevant agencies, schools, and MBG kitchen managers. This study analyzes the institutional governance of the MBG Program in Sumbawa Regency and evaluates the effectiveness of its distribution at the sub-district level. A descriptive qualitative method with a case-study approach was employed. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving relevant agencies, school representatives, kitchen staff, and beneficiary communities, then analyzed thematically to identify patterns of coordination, resources, organizational structure, and distribution practices. The findings show that institutional governance of the MBG Program has been implemented through inter-agency coordination and supportive regulation, although challenges remain, including limited human resources, suboptimal coordination, insufficient supervision, and limited public understanding of the program's long-term objectives. Distribution at the sub-district level has generally been carried out, but challenges persist regarding consistency of standard operating procedures, food safety, and monitoring effectiveness. Overall, institutional governance of the MBG Program has functioned relatively well, though further strengthening of its regulative, normative, and cognitive pillars is needed for more effective, sustainable, and accurately targeted implementation.</i>
Keywords Institutional Governance; Free Nutritious Meal; Program Distribution.	

PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan agenda strategis nasional dalam mewujudkan visi *Indonesia Emas 2045*. Pemerintah Republik Indonesia menempatkan pemenuhan gizi masyarakat sebagai fondasi utama peningkatan kualitas SDM, karena gizi yang baik secara langsung memengaruhi kecerdasan, produktivitas, dan daya saing bangsa (Setneg, 2024). Akses terhadap pangan bergizi seimbang menjadi isu mendasar, terutama bagi anak usia sekolah, ibu hamil dan menyusui, serta kelompok rentan yang berperan sebagai generasi penerus bangsa.

Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam upaya perbaikan status gizi. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting nasional berada pada angka 21,5% pada 2023 dan menurun menjadi 19,8% pada 2024, meski masih jauh dari target 14% dalam RPJMN 2025-2029. Masalah gizi kronis seperti stunting, wasting, dan anemia berdampak multidimensi terhadap kualitas SDM dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks inilah pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai intervensi gizi terintegrasi berskala nasional, yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga koordinatif pengelola program gizi nasional.

Dalam konteks inilah, Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai intervensi gizi terintegrasi berskala nasional. Program ini ditujukan untuk memastikan pemenuhan gizi bagi anak sekolah, ibu hamil, menyusui, serta balita secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan utama makan bergizi gratis tidak hanya meningkatkan kesehatan dan prestasi belajar peserta didik, tetapi juga mengurangi kesenjangan sosial, mendukung ekonomi lokal, dan menumbuhkan kemandirian pangan di tingkat daerah (Badan Pangan Nasional, 2024).

Pelaksanaan program MBG diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN), yang berfungsi sebagai lembaga koordinator pengelola program gizi nasional, termasuk MBG (Kontan, 2024). Perpres ini menjadi dasar hukum bagi tata kelola kelembagaan dan pelaksanaan program lintas sektor, melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah. Melalui BGN, pemerintah menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam memastikan penyediaan makanan bergizi yang aman, sehat, dan tepat sasaran.

Pada awal tahun 2025, pemerintah menargetkan implementasi nasional MBG dimulai serentak pada 2 Januari 2025, dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun, dan sasaran penerima manfaat mencapai 19,5 juta orang. Anggaran ini bahkan diproyeksikan dapat meningkat hingga Rp 171 triliun jika mencakup seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah (Kompas, 2024). Anggaran besar ini menunjukkan komitmen serius pemerintah terhadap perbaikan gizi, namun sekaligus menuntut tata kelola yang transparan, akuntabel, dan efisien di semua tingkat pemerintahan.

Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu wilayah yang secara aktif mengimplementasikan program MBG sejak tahap awal. Pemerintah daerah menargetkan 50 Dapur Makanan Bergizi Gratis yang akan tersebar di berbagai kecamatan, melibatkan masyarakat dan UMKM lokal dalam pengadaan bahan pangan (PPID Sumbawakab, 2024). Total sasaran program di Kabupaten Sumbawa mencapai 153.869 orang, dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 1,4 triliun per tahun (Suara NTB, 2024).

Distribusi makanan bergizi di tingkat kecamatan menjadi ujung tombak keberhasilan program. Di sinilah koordinasi antara dapur, sekolah, dan pemerintah kecamatan diuji. Sebagai contoh, di Kecamatan Unter Iwes dan Kecamatan Sumbawa, dapur MBG dioperasikan untuk melayani ribuan siswa setiap hari, sedangkan Kecamatan Empang dan Alas menghadapi kendala jarak, logistik, serta keterbatasan tenaga pengolah makanan (Sumbawakab.go.id, 2024). Keterlibatan masyarakat lokal dalam manajemen dapur, pengawasan, serta pelaporan menjadi kunci agar program berjalan berkelanjutan dan akuntabel.

Selain itu, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui penguatan rantai pasok bahan pangan lokal. Presiden dan Wakil Presiden menekankan bahwa dana untuk makan bergizi gratis akan “turun ke desa-desa”, menciptakan peluang bagi petani, nelayan, peternak, dan UMKM lokal untuk menjadi pemasok bahan baku program (Setneg, 2024). Dengan demikian, makan bergizi gratis bukan hanya kebijakan kesehatan, tetapi juga strategi ekonomi yang berorientasi pada pemberdayaan lokal.

Meski demikian, pelaksanaan di lapangan masih ditemukan kendala terutama berkaitan dengan konsistensi mutu makanan, sistem pengawasan, dan integrasi data penerima manfaat. Kasus keracunan massal di Kabupaten Sumbawa pada 2024 yang menyebabkan lebih dari 130 siswa dirawat setelah mengonsumsi makanan dari dapur MBG. Fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan dalam rantai distribusi dan pengawasan mutu pangan, hingga memaksa pemerintah daerah menutup sementara

salah satu dapur MBG di Kecamatan Empang dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola distribusi.

Hal ini sejalan dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Bappelitbangda, 2024) menyoroti perlunya peningkatan kapasitas SDM dapur, penegakan SOP keamanan pangan, serta sistem informasi yang memadai untuk memastikan distribusi berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Kondisi ini menegaskan bahwa tata kelola kelembagaan menjadi aspek krusial keberhasilan program, yang mencakup struktur formal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat kabupaten maupun mekanisme koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Ketahanan Pangan. Kelembagaan yang efektif akan memastikan alur pengadaan bahan, pengolahan di dapur MBG, distribusi ke sekolah, hingga pengawasan mutu berjalan sesuai standar operasional (PPID Sumbawakab, 2024).

Dalam konteks akademik, fenomena ini menarik dikaji lebih dalam karena memperlihatkan hubungan antara kebijakan nasional, struktur kelembagaan daerah, dan implementasi di tingkat kecamatan. Analisis tata kelola kelembagaan MBG di Kabupaten Sumbawa dapat memberikan gambaran empiris tentang efektivitas desentralisasi program gizi nasional serta tantangan koordinasi lintas sektor di daerah.

Oleh karena itu, penelitian mengenai Tata Kelola Kelembagaan Program Makan Bergizi Gratis Di Kabupaten Sumbawa, Khususnya Distribusi Di Tingkat Kecamatan, menjadi penting dilakukan. Kajian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana mekanisme kelembagaan lokal bekerja, sejauh mana kapasitas kelembagaan memengaruhi distribusi makanan bergizi, serta bagaimana sinergi antar pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dapat memperkuat efektivitas implementasi program MBG. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah dalam memperkuat koordinasi antar OPD serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas program MBG di Kabupaten Sumbawa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dan kontekstual tata kelola kelembagaan Program MBG di Kabupaten Sumbawa, khususnya terkait distribusi makanan bergizi di tingkat kecamatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pemahaman proses, interaksi, praktik, dan makna yang muncul dalam implementasi program, bukan sekadar mengukur variabel secara kuantitatif. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam bagaimana lembaga pemerintah, sekolah, petugas dapur, dan masyarakat berinteraksi untuk menjalankan program makan bergizi gratis, serta bagaimana praktik tata kelola kelembagaan ini beroperasi di lapangan.

Jenis penelitian ini juga termasuk studi kasus, karena difokuskan pada satu lokasi tertentu, yaitu Kabupaten Sumbawa, dengan analisis mendalam pada distribusi makanan bergizi di beberapa kecamatan. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk menelusuri kondisi nyata di lapangan, dinamika interaksi antar-pemangku kepentingan, penggunaan sumber daya, dan praktik kelembagaan yang kompleks. Metode ini memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menggali fenomena secara rinci, memahami konteks sosial, budaya, dan administratif yang mempengaruhi pelaksanaan program, serta menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel kelembagaan dan keberhasilan distribusi makan bergizi gratis. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang menyeluruh mengenai tata kelola kelembagaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumbawa.

Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah fokus utama yang menjadi sasaran pengamatan, kajian, dan analisis dalam suatu penelitian. Dalam konteks penelitian ini, objek yang diteliti berkaitan dengan struktur organisasi pelaksana program, mekanisme koordinasi antar-lembaga, distribusi sumber daya (tenaga, bahan makanan, dan dana), prosedur distribusi, serta interaksi antara pemerintah, sekolah, petugas dapur, dan masyarakat. Fokus penelitian terletak pada bagaimana lembaga pelaksana mengatur, mengelola, dan mengawasi distribusi makanan bergizi di kecamatan. Dengan demikian, objek penelitian memberikan kerangka bagi peneliti untuk menganalisis secara sistematis proses tata kelola, kendala, praktik terbaik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program makan bergizi gratis.

Sementara subjek penelitian adalah pihak atau individu yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan perspektif mendalam tentang bagaimana program MBG diimplementasikan dan bagaimana tata kelola kelembagaan mempengaruhi efektivitas distribusi makanan bergizi. Oleh karena itu, subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung maupun berperan penting dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumbawa. Subjek penelitian mencakup petugas dinas terkait yang membidangi program gizi, kepala sekolah, guru pendamping, petugas dapur sekolah, dan masyarakat penerima manfaat program. Pemilihan subjek dilakukan dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan langsung mengenai proses distribusi makanan bergizi, tata kelola kelembagaan, koordinasi antar-aktor, serta kendala yang muncul di lapangan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara non-partisipasi, yaitu peneliti mengamati pelaksanaan distribusi makanan bergizi tanpa terlibat langsung sebagai bagian dari kelompok yang diteliti, guna melihat perubahan fenomena sosial yang berkembang di lapangan secara objektif. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan berhadapan langsung dengan informan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pemahaman mereka mengenai pelaksanaan program yang tidak dapat diperoleh hanya melalui observasi. Dokumentasi dilakukan dengan menelusuri data historis dalam bentuk catatan, arsip, laporan, dan foto kegiatan, yang memberikan gambaran mengenai peristiwa dan kondisi yang telah terjadi terkait pelaksanaan program.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola-pola yang muncul terkait komunikasi antaraktor, kapasitas sumber daya, struktur organisasi, serta sikap dan motivasi pelaksana program. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi direduksi, dikategorikan berdasarkan tema tata kelola kelembagaan (pilar regulatif, normatif, dan kognitif), kemudian disajikan dan diinterpretasikan untuk menarik simpulan mengenai efektivitas distribusi program. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian dengan mengacu pada teori kelembagaan baru yang meliputi tiga pilar utama, yaitu regulatif, normatif, dan kognitif (Scott, 2008). Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi, untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Program MBG di Kabupaten Sumbawa

Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumbawa dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional di bidang kesehatan dan pendidikan. Program ini menyasar peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan fokus pemenuhan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral, serta diintegrasikan dengan edukasi gizi bagi siswa dan sosialisasi kepada orang tua. Berdasarkan data pelaksanaan program, jumlah sasaran penerima manfaat di Kabupaten Sumbawa mencapai 198.667 jiwa yang terdiri atas peserta didik, ibu hamil, dan ibu menyusui, namun realisasinya masih bertahap: baru sekitar 66.000 orang (33,2%) yang telah terlayani, sementara 132.667 orang (66,8%) belum terlayani akibat keterbatasan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersedia.

Pelaksanaan program mengacu pada standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kementerian Kesehatan, standar keamanan pangan, standar kebersihan dan sanitasi, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mencakup pengadaan bahan makanan, pengolahan, distribusi, hingga pengawasan dan penanganan kedaruratan. SOP distribusi mensyaratkan makanan dikemas dalam wadah tertutup dan tiba di sekolah maksimal dua jam setelah pengolahan, dengan suhu penyajian minimal 60°C untuk makanan panas, sementara menu disusun dalam siklus sepuluh hari dengan standar minimal 300 kalori dan 8 gram protein per porsi.

2. Mekanisme Distribusi di Tingkat Kecamatan

Alur birokrasi penyelenggaraan MBG berjenjang dari pemerintah pusat hingga sekolah penerima manfaat. Kemenko PMK menetapkan kebijakan nasional yang dijabarkan melalui petunjuk teknis kementerian terkait; di tingkat provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pendidikan NTB menetapkan target penerima dan sertifikasi dapur (SPPG); di tingkat kabupaten, Bupati membentuk Tim Koordinasi MBG yang melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Pendidikan, Kesehatan, Bappelitbangda, dan Inspektorat; di tingkat kecamatan, Camat bertindak sebagai koordinator lapangan melalui Koordinator Kecamatan MBG; sedangkan di tingkat desa, Kepala Desa menyediakan lokasi dapur dan menunjuk pengelola (BUMDes atau yayasan) yang dibantu tim dapur MBG untuk mengolah dan mendistribusikan makanan ke sekolah.

Efektivitas distribusi di lapangan bervariasi antarwilayah. Di kecamatan perkotaan seperti Sumbawa dan Unter Iwes, dapur MBG mampu melayani ribuan siswa setiap hari karena didukung infrastruktur dan akses transportasi yang memadai, sementara Kecamatan Empang dan Alas menghadapi kendala jarak, logistik, dan keterbatasan tenaga pengolah makanan. Dinas Kesehatan berperan menetapkan standar menu, mengawasi mutu dan keamanan pangan dapur, serta berkoordinasi dengan puskesmas untuk inspeksi kesehatan dan penanganan cepat kasus keracunan; Bappelitbangda menjalankan fungsi perencanaan dan evaluasi dampak program; sedangkan Inspektorat Kabupaten mengaudit penggunaan anggaran dan kepatuhan pelaksana terhadap regulasi.

3. Tata Kelola Kelembagaan Program MBG di Kabupaten Sumbawa

Tata kelola kelembagaan dalam Program MBG merupakan suatu proses pengelolaan program yang melibatkan berbagai aktor dan institusi dalam rangka mencapai tujuan peningkatan gizi peserta didik, khususnya di tingkat sekolah. Tata kelola ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan, seperti distribusi makanan, tetapi juga mencakup bagaimana struktur kelembagaan, aturan, nilai, serta

pemahaman bersama bekerja secara terintegrasi dalam mendukung keberhasilan program.

Dalam konteks Kabupaten Sumbawa, tata kelola kelembagaan Program MBG melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, pihak sekolah, serta penyedia layanan makanan. Setiap aktor memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga diperlukan koordinasi yang baik agar program dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Tata kelola kelembagaan yang baik menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu program publik. Hal ini karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dibuat, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Dengan kata lain, tata kelola kelembagaan mencerminkan bagaimana hubungan antar lembaga, aturan yang berlaku, serta nilai dan persepsi yang berkembang dapat mempengaruhi jalannya suatu program.

Dalam penelitian ini, tata kelola kelembagaan dianalisis menggunakan teori kelembagaan baru (*new institutional theory*) menurut Scott (2001) yang menekankan pada tiga pilar utama, yaitu pilar regulatif, normatif, dan kognitif. Ketiga pilar ini menjadi dasar dalam memahami bagaimana suatu lembaga bekerja, memperoleh legitimasi, serta mempertahankan keberlanjutan program.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan, diperoleh informasi berkaitan dengan implementasi tiga pilar kelembagaan baru dalam tata kelola kelembagaan Program MBG di Kabupaten Sumbawa, yang disajikan secara terperinci berikut ini.

a. Pilar Regulatif dalam Tata Kelola Kelembagaan Program MBG

Pilar regulatif dalam tata kelola kelembagaan berkaitan dengan keberadaan aturan formal, kebijakan, serta prosedur yang digunakan untuk mengatur perilaku aktor dalam suatu program. Pilar ini menekankan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan harus didasarkan pada ketentuan yang jelas agar tercipta keteraturan, kepastian, serta meminimalisir terjadinya penyimpangan. Dalam konteks Program MBG di Kabupaten Sumbawa, pilar regulatif menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa proses distribusi makanan kepada siswa berjalan secara tertib, terstruktur, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Sumbawa mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Regulasi tersebut mengatur sasaran penerima manfaat, mekanisme pelaksanaan program, standar pemenuhan gizi, keamanan pangan, serta koordinasi antar-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program.

Adapun prosedur pelaksanaan Program MBG dimulai dari pendataan kelompok sasaran penerima manfaat, penentuan jumlah kebutuhan makanan, pengadaan dan pengolahan makanan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pendistribusian makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat, hingga pembagian makanan kepada siswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara terstruktur dan melibatkan berbagai pihak, yaitu pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, pengelola SPPG, dan pihak sekolah.

Selain itu, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis juga mengacu pada beberapa standar, yaitu standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kementerian Kesehatan, standar keamanan pangan, standar kebersihan dan sanitasi, standar

pengolahan makanan, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) distribusi makanan kepada penerima manfaat. Standar tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pelaksana program untuk menjamin bahwa makanan yang diberikan kepada peserta didik memenuhi kebutuhan gizi, aman dikonsumsi, dan didistribusikan secara tertib.

Meskipun aturan dan prosedur pelaksanaan program MBG telah ada, namun penerapan pilar regulatif dalam tata kelola kelembagaan program MBG belum sepenuhnya optimal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya kendala dalam implementasi aturan, seperti kondisi teknis di lapangan yang tidak selalu mendukung, keterbatasan fasilitas, serta kurangnya pemahaman dari sebagian pelaksana maupun penerima manfaat terkait pentingnya standar keamanan pangan. Selain itu, faktor sumber daya juga menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi belum optimalnya penerapan pilar regulatif. Keterbatasan tenaga kerja, kurangnya pelatihan terkait keamanan pangan, serta belum maksimalnya sistem pengawasan menjadi tantangan dalam memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan standar.

Dalam perspektif pilar regulatif, kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan dan prosedur saja belum cukup untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program. Jika dianalisis lebih lanjut berdasarkan teori kelembagaan Scott (2018), efektivitas pilar regulatif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan formal, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan serta konsistensi dalam penerapannya di lapangan. Hal ini menegaskan bahwa pilar regulatif menekankan pentingnya aturan, pengawasan, serta mekanisme kontrol dalam memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan standar. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penerapan standar dan prosedur perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pilar regulatif dalam Program MBG di Kabupaten Sumbawa pada dasarnya telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan tenaga kerja, minimnya pelatihan keamanan pangan, serta sistem pengawasan yang belum maksimal menjadi faktor yang memengaruhi kondisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek sosialisasi aturan, peningkatan pengawasan, serta konsistensi dalam penerapan prosedur agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Pilar Normatif dalam Tata Kelola Kelembagaan Program MBG

Pilar normatif dalam tata kelola kelembagaan berkaitan dengan nilai, norma, serta etika yang membentuk perilaku aktor dalam menjalankan suatu program. Pilar ini menekankan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan formal, tetapi juga oleh adanya kesadaran, tanggung jawab, komitmen, serta integritas dari para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, pilar normatif berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan bagaimana individu bertindak dalam suatu organisasi.

Dalam konteks Program MBG di Kabupaten Sumbawa, pilar normatif menjadi sangat penting karena program ini tidak hanya menyangkut aspek administratif atau teknis, tetapi juga berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak. Oleh karena itu, pelaksanaan program sangat membutuhkan adanya nilai kepedulian sosial, tanggung jawab moral, serta komitmen yang tinggi dari para pelaksana. Tanpa adanya nilai-nilai tersebut, program berpotensi hanya berjalan secara formalitas tanpa memberikan dampak yang optimal bagi penerima manfaat.

Nilai tanggung jawab dalam program MBG dapat dilihat dari bagaimana

para pelaksana berupaya menjalankan tugasnya dengan baik, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas sesuai prosedur, tetapi juga mencakup kesadaran untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada siswa benar-benar layak, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana tidak hanya bekerja berdasarkan kewajiban, tetapi juga didorong oleh kesadaran moral.

Selain itu, nilai kepedulian sosial juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program. Kepedulian ini tercermin dari sikap pelaksana yang tidak hanya menjalankan tugasnya secara mekanis, tetapi juga menunjukkan perhatian terhadap kondisi siswa sebagai penerima manfaat. Kepedulian ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pelaksana untuk tetap menjalankan program dengan baik meskipun menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pilar normatif dalam tata kelola kelembagaan Program MBG di Kabupaten Sumbawa telah mulai terbentuk melalui adanya nilai tanggung jawab, kepedulian, dan komitmen dari para pelaksana. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam perilaku pelaksana yang tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga menunjukkan kesadaran moral dalam menjaga kualitas makanan serta mendukung kelancaran distribusi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana memiliki etika kerja yang cukup baik, serta adanya kepedulian terhadap penerima manfaat sehingga semakin mempertegas bahwa pilar normatif telah berperan dalam membentuk perilaku pelaksana dalam menjalankan program.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya merata di seluruh aktor yang terlibat. Perbedaan tingkat komitmen di antara pelaksana, serta kondisi lapangan yang tidak selalu mendukung, menjadi faktor yang mempengaruhi konsistensi dalam penerapan nilai-nilai normatif. Selain itu, dari sisi penerima manfaat, pemahaman terhadap nilai-nilai yang mendasari program masih terbatas. Siswa cenderung melihat program ini sebagai bentuk bantuan makanan, tanpa memahami tujuan yang lebih luas terkait peningkatan gizi dan kesehatan.

Jika dianalisis lebih lanjut berdasarkan teori kelembagaan Scott (2018), pilar normatif yang kuat seharusnya ditandai dengan adanya internalisasi nilai secara menyeluruh, keseragaman norma di antara aktor, serta konsistensi dalam penerapannya di lapangan. Dalam penelitian ini, nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi secara merata, baik di tingkat pelaksana maupun penerima manfaat. Perbedaan tingkat komitmen serta keterbatasan pemahaman siswa menunjukkan bahwa nilai-nilai normatif belum sepenuhnya menjadi budaya bersama dalam pelaksanaan program. Hal ini berpotensi mempengaruhi keberlanjutan dan efektivitas program MBG apabila tidak diikuti dengan upaya penguatan nilai secara berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pilar normatif dalam Program MBG telah terbentuk, namun belum sepenuhnya kuat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan melalui peningkatan internalisasi nilai, pembinaan terhadap pelaksana, serta sosialisasi kepada masyarakat agar nilai-nilai yang mendasari program dapat dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh pihak yang terlibat.

c. Pilar Kognitif dalam Tata Kelola Kelembagaan Program MBG

Pilar kognitif dalam tata kelola kelembagaan berkaitan dengan pemahaman, persepsi, serta cara berpikir yang dimiliki oleh aktor dalam memaknai suatu program. Pilar ini menekankan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya

ditentukan oleh aturan dan nilai yang ada, tetapi juga oleh sejauh mana aktor memahami, menerima, dan meyakini tujuan dari program tersebut. Dengan kata lain, pilar kognitif berfungsi dalam membentuk kesadaran kolektif yang membuat suatu program dianggap penting, wajar, dan perlu untuk dijalankan secara berkelanjutan.

Dalam konteks Program MBG di Kabupaten Sumbawa, pemahaman pelaksana menjadi faktor penting karena pelaksana merupakan pihak yang secara langsung menjalankan program di lapangan. Pemahaman yang baik terhadap tujuan program akan mempengaruhi bagaimana pelaksana menjalankan tugasnya, termasuk dalam menjaga kualitas makanan dan memastikan distribusi berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pilar kognitif dalam tata kelola kelembagaan Program MBG di Kabupaten Sumbawa telah mulai terbentuk, khususnya pada pelaksana di tingkat dapur MBG. Hal ini ditunjukkan oleh adanya pemahaman yang cukup baik mengenai tujuan program, serta kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas makanan sebagai bagian dari tanggung jawab dalam mendukung keberhasilan program. Para pelaksana memandang Program MBG tidak hanya sebagai kegiatan pemberian makanan, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan siswa. Selain itu, para pelaksana juga memiliki kesadaran kolektif mengenai peran mereka dalam mendukung keberhasilan program. Hal ini menjadi indikasi bahwa pilar kognitif telah mulai terbentuk di tingkat pelaksana.

Namun demikian, meskipun pelaksana di tingkat dapur memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap tujuan jangka panjang dari program, tetapi pemahaman tersebut belum merata pada seluruh aktor yang terlibat dalam program. Perbedaan tingkat pemahaman antara pelaksana, pihak sekolah, dan siswa menunjukkan bahwa pilar kognitif belum sepenuhnya terbentuk secara menyeluruh.

Jika dianalisis berdasarkan teori kelembagaan Scott (2020), pilar kognitif yang kuat seharusnya ditandai dengan adanya kesamaan pemahaman dan persepsi di antara seluruh aktor yang terlibat, sehingga program dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, pemahaman tersebut masih belum sepenuhnya merata, terutama pada tingkat penerima manfaat yang masih memandang program sebagai bantuan semata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pilar kognitif dalam Program MBG telah terbentuk pada sebagian aktor, namun masih perlu diperkuat melalui sosialisasi dan peningkatan pemahaman kepada seluruh pihak yang terlibat. Penguatan ini penting agar program tidak hanya dijalankan secara teknis, tetapi juga dipahami sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, tata kelola kelembagaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumbawa telah menunjukkan penerapan tiga pilar kelembagaan, yaitu regulatif, normatif, dan kognitif. Namun, ketiga pilar tersebut belum memiliki tingkat penguatan yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada ketersediaan regulasi, tetapi juga pada kepatuhan pelaksana, internalisasi nilai, serta kesamaan pemahaman seluruh aktor terhadap tujuan program.

1. Pilar Regulatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilar regulatif telah memiliki dasar yang cukup jelas melalui regulasi, petunjuk teknis, standar gizi, keamanan pangan, serta SOP distribusi makanan. Aturan tersebut memberikan kepastian mengenai tugas, prosedur, dan standar yang harus dipenuhi oleh setiap aktor dalam pelaksanaan Program MBG.

Namun, penerapannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan fasilitas, tenaga kerja, pelatihan keamanan pangan, serta pengawasan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan formal dengan praktik di lapangan. Sesuai perspektif kelembagaan Scott, kekuatan pilar regulatif tidak hanya terletak pada keberadaan aturan, tetapi juga pada kepatuhan, pengawasan, dan konsistensi penerapannya. Oleh karena itu, Program MBG membutuhkan penguatan kapasitas pelaksana dan sistem pengawasan agar aturan dapat diterapkan secara konsisten.

2. Pilar Normatif

Pada pilar normatif, hasil penelitian menunjukkan adanya nilai tanggung jawab, kepedulian, komitmen, dan kesadaran moral dari para pelaksana. Nilai tersebut terlihat dari upaya pelaksana untuk menjaga kualitas makanan dan memastikan makanan dapat diterima siswa secara layak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya didasarkan pada kewajiban administratif, tetapi juga pada tanggung jawab sosial terhadap penerima manfaat.

Meskipun demikian, internalisasi nilai tersebut belum merata pada seluruh aktor. Perbedaan tingkat komitmen pelaksana dan keterbatasan pemahaman penerima manfaat menunjukkan bahwa nilai Program MBG belum sepenuhnya menjadi norma bersama. Dalam perspektif Scott, pilar normatif akan semakin kuat apabila nilai dan norma telah diterima serta menjadi pedoman perilaku seluruh aktor. Dengan demikian, pembinaan pelaksana dan sosialisasi kepada penerima manfaat perlu diperkuat agar terbentuk komitmen bersama terhadap tujuan Program MBG.

3. Pilar Kognitif

Hasil penelitian pada pilar kognitif menunjukkan bahwa pelaksana, khususnya pada tingkat dapur MBG, telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai tujuan program. Pelaksana memahami bahwa Program MBG bukan sekadar pemberian makanan, tetapi merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik.

Namun, kesamaan pemahaman tersebut belum terbentuk pada seluruh aktor. Sebagian penerima manfaat masih memandang Program MBG sebatas bantuan makanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa makna dan tujuan program belum dipahami secara kolektif. Dalam perspektif Scott, pilar kognitif menjadi kuat ketika seluruh aktor memiliki kerangka pemahaman dan persepsi yang relatif sama terhadap suatu institusi atau program. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi mengenai tujuan, manfaat, serta keberlanjutan Program MBG perlu diperkuat.

Secara keseluruhan, tata kelola kelembagaan Program MBG di Kabupaten Sumbawa telah memiliki fondasi regulatif, normatif, dan kognitif, tetapi belum sepenuhnya optimal. Pilar regulatif menghadapi persoalan konsistensi implementasi dan pengawasan, pilar normatif menghadapi ketidakmerataan internalisasi nilai, sedangkan pilar kognitif menghadapi perbedaan pemahaman antaraktor. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola Program MBG perlu dilakukan secara terpadu melalui peningkatan kepatuhan terhadap aturan, penguatan komitmen dan nilai bersama, serta pembentukan kesamaan pemahaman mengenai tujuan program.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola kelembagaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumbawa telah menunjukkan penerapan yang cukup baik pada tiga pilar kelembagaan, yaitu pilar regulatif, normatif, dan kognitif, meskipun implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Pada pilar regulatif, program telah memiliki aturan dan prosedur yang mengatur perekrutan tenaga kerja hingga pengolahan dan distribusi makanan, tetapi konsistensi penerapan standar keamanan pangan masih perlu ditingkatkan, sebagaimana ditunjukkan oleh kasus gangguan kesehatan siswa. Pada pilar normatif, nilai tanggung jawab dan kepedulian pelaksana telah mulai terinternalisasi namun belum merata di seluruh aktor. Pada pilar kognitif, pemahaman terhadap tujuan jangka panjang program masih terbatas, terutama pada siswa sebagai penerima manfaat yang cenderung memandang program hanya sebagai bantuan makanan gratis.

Secara keseluruhan, mekanisme distribusi Program MBG di tingkat kecamatan Kabupaten Sumbawa pada umumnya telah terlaksana melalui alur birokrasi berjenjang dari pemerintah pusat hingga sekolah, namun efektivitasnya bervariasi antarwilayah sesuai kondisi infrastruktur dan logistik setempat. Tata kelola kelembagaan program telah berjalan, tetapi memerlukan penguatan lebih lanjut agar pelaksanaannya lebih efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tata kelola kelembagaan Program MBG di Kabupaten Sumbawa, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Pemerintah Terkait

Instansi pemerintah terkait perlu memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG, terutama dalam penerapan standar keamanan pangan, kebersihan, sanitasi, serta prosedur distribusi makanan. Pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi antarinstansi dan memberikan pelatihan secara berkala kepada pelaksana program. Selain itu, sosialisasi mengenai tujuan, manfaat, dan ketentuan Program MBG perlu ditingkatkan agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama dan mampu menjalankan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Bagi Pengelola Dapur MBG

Pengelola dapur MBG perlu meningkatkan konsistensi dalam menerapkan standar operasional, khususnya terkait kebersihan, keamanan pangan, pengolahan makanan, pemenuhan kebutuhan gizi, dan ketepatan distribusi. Pengelola juga perlu meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan serta memperkuat tanggung jawab dan komitmen setiap pelaksana. Evaluasi internal secara rutin perlu dilakukan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kendala dalam proses penyediaan makanan sehingga kualitas pelayanan kepada penerima manfaat dapat terus meningkat.

3. Bagi Sekolah dan Siswa

Pihak sekolah perlu meningkatkan perannya dalam mengawasi proses penerimaan dan pembagian makanan serta memberikan edukasi kepada siswa mengenai tujuan dan manfaat Program MBG, serta membangun komunikasi yang baik dengan pengelola dapur dan instansi terkait. Sementara itu, siswa diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya makanan bergizi, menjaga kebersihan selama pelaksanaan program, serta memanfaatkan makanan yang diberikan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, Program MBG tidak hanya dipahami sebagai bantuan makanan, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kesehatan dan kualitas gizi peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, R. M., Muharrom, N. W., Kusuma, N. A., & Hadji, K. (2026). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Evaluasi Pelaksanaan dan Tantangan Operasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1413-1423.
- Chomsatu, Y., Irawati, D., & Pramono, D. (2013). Implementasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dalam Upaya Peningkatan Status Gizi Anak Sekolah di Kabupaten Magetan. *Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen Pemerintahan*, 1(2), 112-125.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th Ed)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). *The New Public Service: Serving, Not Steering (2nd Edition)*. New York: Routledge.
- Edward, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Ga'a, M. E., Kasi, Y. F., & Epu, Y. D. A. (2025). Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Nagekeo: Tujuan dan Tahapannya. *Jurnal Inspirasi Peternakan*, 5(2), 84-89.
- Hastuti, R., & Hariyadi, A. M. (2026). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah: Tinjauan literature terhadap Tantangan Tata Kelola dan Implikasi Kebijakan. *Pro Health Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 8(1), 16–21.
- Herningtyas, T., Azrianti, S., Fadjriani, L., & Yulisa, P. D. (2025). Efektivitas Program MBG (Makan Bergizi Gratis) pada Anak TK Darussalam Guna Peningkatkan Kualitas Belajar Mengajar di Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Sidoarjo. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(10), 6520-6526.
- Kurniasih, E., & Wijayanti, S. (2019). Pengelolaan Program Gizi Seimbang pada Anak Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 14(4), 185-192.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview, III: Scott, Foresman.
- Osborne, S. P. (2006). The New Public Governance?. *Public Management Review*, 8(3), 377-388.
- Pambudi, R. A., & Rahmawati, T. (2021). Evaluasi Implementasi Program Gizi Anak Sekolah di Kabupaten Bantul. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 8(2), 55-70.
- Rachmawati, I., Azizah, D. N., & Sutisna, A. (2026). Peran Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Peningkatan Status Gizi dan Tingkat Kesukaan Makanan Penerima Manfaat di Kabupaten Majalengka Jawa Barat. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 39-45.
- Ratih, A., & Maria, G. A. R. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Kebijakan Pendukung Pendidikan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Ekspos*, 3(2), 80-88.

- Rozak, A., Izzah, A. N. L., & Chusna, C. A. (2025). Dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap Konsentrasi Siswa Kelas III Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 9(5), 11603-1612.
- Scott, WR (2008). *Institutions and Organizations: Ideas and Interests (3rd Edition)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Setiawan, A. R., & Mulyani, R. (2020). Governance dalam Program Pemberian Makanan Tambahan di Sekolah Dasar. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Negara*, 7(1), 33-46.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zainal, A. (2022). Tata Kelola Kelembagaan dalam Program Gizi Masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 5(2), 99-110.
- Zaenudin, D. (2025). Manfaat Program Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Kesehatan dan Konsentrasi Belajar Siswa di SMAN 1 Pebayuran. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 17297-301.